

ABSTRAK

A. Putri Dyana Waris. 105261128420. *Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.* Dibimbing oleh Abbas dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum anak zina dan analisis hak nafkah anak zina menurut fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 serta hubungannya dengan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode book survey/studi kepustakaan (library research), yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari berbagai macam pustaka yang sesuai dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan metode analisis data, yaitu proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya (ayahnya), dia hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian tidak menghilangkan tanggungjawab ayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 menolak putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil zina yang mempunyai hak keperdataan dengan ayahnya jika secara biologis terbukti bahwa anak tersebut adalah hasil perzinaan antara ayah dan ibunya. Fatwa MUI menyatakan bahwa putusan MK tersebut menyimpang dari agama Islam, yang mana anak hasil zina hanya bisa dinasabkan kepada keluarga ibunya. Untuk memutuskan sebuah putusan yang berkaitan dengan syariat Islam, maka dalam pembetukannya harus sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam dan tidak menyimpang darinya.

Kata Kunci: Nafkah; Anak Zina; Fatwa MUI.

ABSTRACT

A. Putri Dyana Waris. 105261128420. *Analysis of the Right to Livelihood of Zina Children According to MUI Fatwa Number 11 of 2012 and Its Relationship with Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Guided by Abbas and Ahmad Muntazar.*

This research aims to determine the law of adulterous children and the analysis of the right to provide for adulterous children according to MUI fatwa number 11 of 2012 and its relationship with the Constitutional Court decision number 46 / PUU-VIII / 2010.

The method used by researchers in this study is the book survey method / library research (library research), which is a research technique that aims to collect data and information with the help of various kinds of libraries in accordance with this study. Researchers also use data analysis methods, which are research processes in which the collected data is processed to respond to problem formulation.

The results of this research are the child resulting from adultery cannot be declared to the man who caused his birth (his father), he can only be declared to his mother and his mother's family. However, it does not eliminate the father's responsibility to provide for the child's life and provide property after he dies through a mandatory will. MUI fatwa number 11 of 2012 rejects the decision of the Constitutional Court number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the status of children resulting from adultery who have civil rights with their fathers if biologically proven that the child is the result of adultery between father and mother. The MUI's fatwa stated that the Constitutional Court's ruling deviated from Islam, in which adulterous children can only be assigned to their mother's family. To decide on a decision relating to Islamic Shari'a, it must be in accordance with the basics of Islamic law and not deviate from it.

Keyword: *Living; Adultery Children; MUI Fatwa.*